BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1.Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitannya. secara ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah dan pemerintahan. pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya (Kansil,2003).

Pengertian di atas mengemukakan bahwa pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas, fungsi, wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara.

Menurut Victor Situmorang, secara etimologi pemerintah dapat didefinisikan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah, yaitu kata nama subjek yang berdiri sendiri (Situmorang,Victor.1994).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pemerintah merupakan badan tertingi yang memerintah suatu negara karena memiliki kekuasaan tertinggi seperti kabinet dan kata pemerintah merupakan subjek yang berdiri sendiri.

Pemerintahan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerintah yang merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelnggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Menurut Victor secara etimologi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

> Pemerintahan dilihat dari segi kata bahasa merupakan kata jadian yang karena subjek mendapatka akhiran -an, artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas atau kegiatan ssedangkan cara melakukan tugas kegiatan itu disebut pemerintahan. dengan kata lain, pemerintahan adalah perbuatan pemerintahan (Situmorang,Victor.1994).

Pengertian pemerintahan diatas menjelaskan bahwa dilihat dari segi Bahasa pemerintah mendapatakan kata tambahan –an dibelakang kata pemerintah. Pemerintah melakukan tugas dan fungsinya sedangkan pemerintahan merupakan cara melakukan dari tugas dan fungsi dari pemerintah, dengan kata lain pemerintahan merupakan perbuatan dari pemerintah.

Pengertian pemerintahan juga dikemukakan oleh Ndraha Taliziduhu yaitu sebagai berikut: “Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di-perintah akan jasa publik dan layanan civil”. (Ndraha Taliziduhu, 2003)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi yang di-perintah akan pelayanan publik.

Menurut Ermaya Suradinata mendefinisikan pemerintahan secara lebih sederhana sebagai berikut:

> “*Government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exercing its authority* artinya pemerintah dalam definisi

> terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya" (Suradinata, Ermaya,1998).

Pendapat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kekusaan diperlukan untuk menggerakan berbagai aktivitas pemerintaan, baik penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit yang dijalankan oleh ekksekutif maupun penyelenggaraan pemerintahan secara luas yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pengertian pemerintahan juga dikemukan oleh Muchlis Hamdi yang menyebutkan pengertian pemerintahan sebagai berikut:

> "Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata". (Hamdi Muchlis,2006)

Berdasarkan pengetian diatas mengemukakan bahwa pemerintah merupakan suatu gejala yang kompleks dan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Pemerintahan harus terus agar dapat diterima secara oleh masyarakat dari sisi nilai wajar dan merata.

a. Fugsi Pemerintahan

Fungsi pemerintah dipaparkan oleh Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) (Rasyid,1996). Fungsi

pemerintahan harus dijalankan agar masyarakat yang memeberikan kepercayaan tidak merasakan kekecewaan atas harapan untuk dipenuhi kebutuhan akan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari sifat tujuan negara pada awalnya, yaitu mengatur berbagai kepentingan rakyat begitu tidak ada konflik di antara orang-orang itu sendiri. Maka semakin banyak rumitnya kebutuhan masyarakat, negara membutuhkan lembaga mengatur kepentingan-kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid bahwa pemerintah adalah personifikasi negara, padahal birokrasi dan aparaturnya adalah personifikasi dari pemerintah (Rasyid,1996). Ekspresi Hal itu mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat ditolak pihak tersebut yang paling aktif dalam pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang bertindak sebagai pelaksana keputusan dirumuskan oleh para pemimpin politik.

Terkait dengan fungsi pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa:

> "Pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti pemberdayaan dan dalam arti memungkinkan. Dalam arti memberdayakan, memberdayakan, yaitu pemberian hak atau peluang kepada publik untuk disampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, demikianlah adanya politik. Dalam arti memungkinkan, pemberdayaan, yang merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemampuan masyarakat untuk melakukan sesuatu untuk membantu diri mereka sendiri dan memberikan kontribusi besar mungkin untuk integritas nasional (Taliziduhu,Ndraha,2003).

Berdasarkan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dari arti pemberdayaan dan memungkinkan. Arti pemberdayaan yaitu pemberian hak atau peluang kepada masyarakat untuk

disampaikan dan diperjuangkan untuk masa depannya demikianlah adanya politik yang dapat mempengaruhinya. Sedangkan dalam arti memungkinkan pemberdayaan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kapasistas dan kemampuan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya untuk membantu dirinya sendiri dan dapat memeberikan kontribusi bagi nasional.

Sedangkan fungsi pengembangan (*development*), Taliziduhu Ndraha berpendapat bahwa fungsi pengembangan bukanlah fungsi penting pemerintah, melainkan fungsi sementara iklan, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri (Taliziduhu,Ndraha,2003). Konsep pengembangan hanya dikenakan pada "Dunia Ketiga", dikelola sesuai dengan administrasi pembangunan yang diajarkan oleh negara maju kepada klien mereka di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), tidak ada perkembangan.

Selanjutnya menurut pendapat Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa:

> “Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi utama atau fungsi layanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang tidak diprivatisasi termasuk layanan pertahanan dan keamanan, layanan sipil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan permintaan diatur oleh barang dan jasa yang tidak dapat mereka penuhi sendiri (Taliziduhu,Ndraha,2003).”

Berdasarkan yang dikemukakan diatas pemerintah memiliki dua fungsi dasar utama yaitu pelayanan dan fungsi sekunder yaitu pemberdayaan. Fungsi utama yaitu pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak diprivatisasi termasuk pelayanan akan perlindungan dan keamanan. Fungsi

sekunder yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan permintaan masyarakat yang diataur oleh barang dan jasa yang masyarakat tidak dapat penuhi dengan sendirinya. Fungsi pemerintah menurut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut: "Fungsi pemerintahan adalah fungsi internal melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang mencakup fungsi pengaturan, layanan, pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan ". (UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2).

Berdasarkan UU diatas mengemukakan bahwa fungsi pemerintah ada lima yaitu, pengaturan atau kebijakan, layanan atau pelayanan, pengembangan atau pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Kelima fungsi tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya karena tertuang dalam UU yang dimana pemerintah wajib menjalankannya karena hal tersebut merupakan amanah dari rakyat.

2.1.2. Masyarakat

Masyarakat adalah istilah yang sangat umum digunakan untuk merujuk pada satu kesatuan Bahasa Arab adalah *Syaraka* yang berarti berpartisipasi, memahami, dan siapa kemudian ganti bahasa Indonesia menjadi Publik. Masyarakat adalah kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya (Koentjoroningrat,2000). Berdasarkan yang dikemukakan diatas bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling

berinteraksi satu sama lain menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan terus dilakukan sehingga terikat oleh rasa dan identitas yang sama.

Masyarakat menurut Alimandan dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, menjelaskan:

> "Pengertian masyarakat dengan istilah community, dimana istilah tersebut menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa hingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok itu disebut masyarakat". (Alimanda,1985)

Pendapat diatas meyebutkan bahwa masyarakat komunitas yang merujuk pada warga baik di desa, kota, Suatu suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhannya untuk hidup maka kelompok tersebut dapat dikatakan masyarakat.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama, bersatu karena mereka berbagi identitas, minat bersama, perasaan memiliki, dan biasanya satu dan tempat yang sama (Suharto,2006). Berdarkan pendapat diatas bahwa masyarakat masyarakat memiliki perasaan yang sama, rasa saling memiliki, berbagi identitas dan dalam satu tempat yang sama.

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat memiliki beberapa unsur yakni sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal dua orang
2. Anggotanya sadar sebagai suatu kesatuan
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan
4. manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan
5. hubungan antara anggota masyarakat
6. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta
7. keterkaitan satu sama lain dengan anggota masayarakat.
   (Soekanto,2006)

Berdasarkan pengertian diatas menyatakan bahwa masyarakat memiliki beberapa unsur yang harus dimiliki untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat seperti yang disebutkan sebagaimana diatas. Masyarakat saling memenuhi kebutuhan akan hidupnya untuk bertahan hidup, saling memiliki perasaan untuk bersatu, berinteraksi dengan sesame serta menimbulkan suatu budaya sebagai ciri khasnya sebagai masyarakat.

2.1.3. Pemberdayaan

Pemberdayaan juga bermakna sebagai upaya distribusi ulang kekuatan (*power*) dari pihak yang memilikinya kepada pihak yang tidak atau kurang memilikinya. Oleh Karena itu, pemberdayaan selalu mengandung pengertian :

1. Pengurangan atau pemindahan daya (power) atau upaya melakukan *disempowerment*/*less empowering* pihak-pihak yang memiliki kekuatan/ daya (power),
2. Penyerahan/penambahan daya (power) kepada pihak-pihak yang diberdayakan (*empowerment*).(Dwi,Herlini,2017)

Pengertian diatas mengemukakan bahwa upaya pendistribusian kekuatan (*power*) dari pihak yang memilikinya kepada pihak yang belum memilikinya untuk menambah atau menyalurkan kekuatan kepada pihak-pihak yang diberdayakan.

Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan. Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk :

1. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha

untuk mentranspormasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.

2. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat (Pambudi,2003).

Sulistiyani menjelaskan bahwa "Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan" (Sulistiyani,2004) . Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Berdasarkan pengertian diatas mengemukakan bahwa Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik.

2.1.3.1.Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/

kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh Sulistiyani,2004). Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama- sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat yang mengemukakan bahwa:

> "masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama" (Sumodingrat,2009).

Berdasarkan pengertian diatas mengemukakan bahwa mahluk hidup merupakan mahluk sosial maupun ekonomi sehingga pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membuat semangat hidup secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing secara bersama-sama.

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Sunit Agus Tri Cahyono,2008). Dalam konteks dengan masyarakat,

pemberdayaan mengacu pada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua pengertian, yaitu (a) *to give power or authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (b) *to give ability to* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan atau bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan keberdayaan seseorang (Randy R dan Riant N,2007).

Menurut Jim Ife mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (d*isadvantaged*) (Ife, Jim.1995). Menurutu pendapat Payne dalam Adi mengemukakan bahwa:

> "Proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya" (Adi,2003).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memamfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian

masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses pemberdayaan. Ada beberapa cara pandang menurut Sutoro Eko yang dapat digunakan dalam memahami pemberdayaan masyarakat yaitu :

a. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara.
b. Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan (*needs*) masyarakat. banyak orang berargumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis (ngayawara) seperti demokrasi, desentralisasi, *good governance*, otonomi daerah, masyarakat sipil dan seterusnya. “apa betul masyarakat desa butuh demokrasi dan otonomi desa. Masyarakat itu hanya butuh pemenuhan sandang, pangan dan papan (spp). ini yang paling dasar. tidak ada gunanya bicara demokrasi kalau rakyat masih miskin. pendapat ini masuk akal, tetapi sangat dangkal. mungkin kebutuhan spp itu akan selesai kalau terdapat uang yang banyak. tetapi persoalannya sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sangat langka (*scarcity*) dan terbatas (*cobstrain*).
c. Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan *voice*, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara.
d. Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. pemberdayaan struktur-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang (Sutoro, Eko,2004).

Berdasarkan cara pandang yang dikemukakan diatas bahwa masyarakat bukan sebagai obyek penerima yang bergantung pada dari pihak luar seperti pemerintah melainkan masyarakat berdiri sendiri bergerak secara mandiri sebagai agen atau pastisipan yang bertindak tapi tidak lepas dari tanggungjawab negara. Pemberdayaan secara prinsipil merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan (SPP). Masyarakat pedesaan tidak penting untuk berbicara mengenai demokrasi, desentralisasi, otonomi daerah dan lainya jika masyarakat masih miskin tidak akan masuk ke akal, masyarakat mementingkan kebutuhan SPP namun sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat terbatas.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu disadari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan. Dalam buku pengembangan masyarakat wacana dan praktik yang dikutip oleh Zubaedi mengemukankan bahwa Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan:

a. Kekuatan atas pilihan pribadi
b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri
c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi
d. Kekuatan kelembagan
e. Kekuatan dalam sumber daya ekonomi
f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi
   (Ife, Jim, 1997)

Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife mengidentifikas 6 jenis kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan. Guna memperjelas keenam indentifikas kekuatan untuk melakukan

pemberdayaan ini akan diabahas akan diabahs secara teoritik untuk diketahui unsur-unsurnya dan sifat-sifatnya.

a. Kekuatan atas pilihan pribadi
   Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri
   Pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhan sendiri.
c. Kekuatan dalam berekspresi
   Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam budaya publik.
d. Kekuatan dalam kelembagaan
   Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
e. Kekuatan dalam sumber daya ekonomi
   Pemberdayaan dilakukan dengan menngkatkan aksesibiltas dan kontrol terhadap aktivtas ekonomi.
f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi
   Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi (Ife, Jim,1997)

Berdasarkan yang dikemukakan diatas bahwa masyarakat perlu disadari bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat tidak memiliki keuatan. Identifikasi kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan pemberdayaan terdapat 5 kekuatan yang dimiliki masyarakat.

Oleh karena itu, batas antara sasaran dan pelaku pemberdayaan masyarakat sangatlah tipis sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran adalah sekaligus sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan

dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mereka lakukan. Hal ini memiliki arti, menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja. Dalam konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang semula obyek menjadi subyek. Dalam hal ini, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama dari hubungan yang asimetris antara subyek-obyek menjadi hubungan yang simetris yakni subyek-subyek (Suparjan dan Hempri S, 2003). Selain itu, proses pemberdayaan juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Dalam konteks ini, peran aparat pemerintah harus lebih diarahkan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah. Selain itu, aparat pemerintah harus lebih sebagai toko pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibandingkan sebagai sebuah kantor unit birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta partisipasi masyarakat. (Suparjan dan Hempri S, 2003).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam mencapai suatu kemandirian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penerima pasif saja namun ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan pemerintah berperan sebagai fasilitator atau pelayan masyarakat.

Peran yang dimaikan oleh pemberdayaan hakikatnya merupakan untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi-tawar) agar masyarakat mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan kapasitas. Menurut pendapat yang di kemukakan oleh Totok Mardikanto dalam bukunya yang berjudul pemberdayaan masyarakat mengatakan, penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan (Mardikanto,2019).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas bahwa pemberdayaan merupakan memperkuat kemampuan masyarakat agar dapat mandiri dengan menigkatkan kapasitas individu dari masyarakat, organisasi dan kelembagaan yang lain agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut Totok mengemukakan pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan kapasitas untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat mencakup:

a. Kapasitas Individu (warga masyarakat)
b. Kapasita kelembagaan (organisasi dan nilai-nilai prilaku)
c. Kapasitas jejaring (*networking)* dengan lembaga lain dan interaksi dengan sistem lebih luas. (Mardikanto,2019)

Berdasarkan yang dikemukakan diatas bahwa pemberdayaan diartikan sebagai penguatan kapasitas untuk menumbuhkan masyarakat menajdi mandiri dan mampu tersebut mencakup tiga hal yaitu kapasitas individu, kelembagaan dan jejaring. Hal tersebut merupakan langkah dalam memberdayaankan masyarakat agar menjadi mandiri dan mampu berpartisipasi sehingga antara masyarakat dengan pemerintah terciptanya kolaborasi dan pemberdayaan dapat terlaksana dengan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, tiga cakupan untuk melakukan pemberdayaan diatas akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini karena memiliki hubungan antara masalah yang peneliti lakukan.

2.1.3.2.Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu strategi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator (Sumodiningrat,2009). Menurut Sumodiningrat terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan

pendampingan sosial, yaitu:

a. Motivasi
   Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.
b. Peningkatan Kesadaran dan pelatihan kemampuan
   Disini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan sumber penghidupan dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri.
c. Manajemen diri
   Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan. Disini pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk mengembangkan sebuah sistem. Kemudian memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
d. Mobilisasi sumber
   Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial.
e. Pembangunan dan pengembangan jaringan
   Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin (Sumodiningrat, 2009).

Berdasarkan yang dikemukakan diatas bahwa terdapat 5 (lima) strategi untuk melakukan pemberdayaan yaitu motivasi untuk mendorong masyarakat untuk diberdayakan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dengan

kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Peningkatan kesadaran dan pelatihan, hal ini dapat dilakukan dimulai dari pendidikan dasar sehingga masyarakat sejak kecil memiliki kesadaran yang dibutuhkan nantinya dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dapat dikembangkan melalui cara partisipatif.

Menurut Jim Ife ada 3 strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1) Perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*)
   Untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan. Misalnya : kebijakan membuka peluang kerja yang luas, UMR yang tinggi, dsb.
2) Aksi sosial dan politik (*sosial dan political action*)
   Diartikan agar sistem politik yang tertutup diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memporoleh kondisi keberdayaan.
3) Peningkatan kesadaran dan pendidikan
   Masyarakat/kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya skill untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk mengataasi masalah ini peningkatan kesadaran dan pendidikan sangatlah penting untuk diterapkan. Contoh : memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur penindasan terjadi, memberi sarana dan skill agar mencapai perubahan secara efektif (Ife,Jim,1995).

Berdasarkan yang dikemukakan diatas strategi yang dilakukan dalam melakukan pemberdayaan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Aksi social dan politik yang memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik untuk memungkinnya memperoleh kondisi keberdayaan dan peningkatan kesadaran dan pendidikan untuk

memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak di tindas secara tidak kasat mata maka diperlukannya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2.1.3.3.Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalahmasalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, pikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:80).

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemampuan konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kemampuan afektif merupakan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan-keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Pemberdayaan diupayakan menuju kemandirian klien yaitu suasana atau kondisi tertentu yang membuat individu atau kelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Chatarina Rusmiyati, 2011).

Hasil yang diharapkan dari proses pemberdayaan adalah tumbuhnya kompetensi masyarakat (tanggung jawab sosial dan kapasitas masyarakat). Kompetensi tanggung jawab memiliki arti bahwa tanggung jawab perkembangan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Sementara terkait dengan kompetensi kapasitas, terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri (Suparjan dan Hempri S, 2003). Sunit mengemukakan bahwa tujuan akhir pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian sasaran dalam masyarakat (individu, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat) (Sunit Agus Tri Cahyono,2008). Sedangkan Sri Kuntari mengemukakan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi swadiri, mampu mengurusi dirinya sendiri; swadana, mampu membiayai keperluan sendiri; dan swasembada, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan (Sri Kuntari,2009).

Dari berbagai pendapat di atas, disimpulkan bahwa inti dari tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada kedermawanan dari pihak lain. Dalam hal ini masyarakat

diharapkan bisa menjadi pribadi yang swadiri (mampu mengurusi dirinya sendiri), swadana (mampu membiayai keperluan sendiri), dan swasembada (mampu memenuhui kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan).

2.1.3.4.Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian.

"Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapanketerampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian" (Ambar Teguhdan Sulistiyani, 2004)

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan-keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berperan pasif, yaitu

sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja.

Wilson mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari:

1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.
2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/ kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan.
3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/ perbaikannya.
5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru (Mardikanto, 2013).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal-hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengkaji potensi, permasalahan serta peluang-peluangnya; menyusun rencana kegiatan kelompok; menerapkan rencana kegiatan kelompok;

serta memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus. Tahap terakhir adalah pemandirian masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan pada intinya ialah penyadaran masyarakat. Penyadaran masyarakat dilaksanakan dengan sosialisasi. Tujuannya yaitu mengkomunikasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan serta menumbuhkan keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Proses pemberdayaan masyarakat. Dilaksanakan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf subjek. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.

2.1.4. Kajian Tentang Sampah

2.1.4.1.Pengertian Sampah

Sampah adalah barang yang tidak digunakan kembali, tidak memiliki nilai hasil dan tidak diinginkan kembali, dari hasil kegiatan manusia sehari-hari. Davis

dan Cornwell dalam Sulistiyorini dkk menjelaskan bahwa kata sampah padat merupakan suatu kata yang umum digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kita buang (Sulistiyorini dkk, 2015). Sampah padat, dimana terdiri dari bermacam benda-benda yang sudah dibuang, mengandung berbagai macam zar baik yang dapat berbahaya maupun tidak bebahaya. Akan tetapi secara umum, sampah padat yang menumpuk mampu menimbulkan dampak yang cukup serius bagi populasi manusia yang padat. Dari penjelasan tersebut, masalah sampah sebagai salah satu permasalahan lingkungan dapat dikatakan juga sebagai masalah sosial yang perlu diatur karena mempengaruhi kehidupan masyarakat luas sebagaimana dikatakan bahwa lingkungan merupakan factor pendukung kehidupan manusia.

Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip *3R. 3R* adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Langkah utama adalah penilihan sejak dari sumber dihasilkanSampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi.

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir

semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Menurut Nilandari berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai :

1. Sampah Organik

   Sampah Organik terdiri dari bahan – bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun
2. Sampah Anorganik.

   Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan alumunium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan perkecualian. Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka di dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik (Nilandari 2006).

Berdasarkan yang dikemukakan diatas bahwa sampah dibagi menjadi 2 jenis yaitu sampah organik dan anorganik yang dimana sampah organic merupakan sampah yang mudah diuraikan karena hasil dari kegiatan pertanian, perikanan dan lainnya. Sampah ini sebagian besar terdapat di rumah tangga hasil dari sisa-sisa memasak makanan sayuran, tepung, kulit buah dan daun-daun. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan dengan mudah seperti sampah plastik. Sampah anorganik banyak terdapat di perindustran, perkantoran, pasar dan rumah tangga.

Sumber Sampah dapat dibedakan berdasarkan asal timbulan sampah itu berada sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya sampah terdiri dari sampah organic dan anorganik. Sumber sampah menurut Gilbert sumber sampah berasal dari:

1. Sampah dan Pemukiman

   Umumya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.
2. Sampah dari Pertanian dan Perkebunan

   Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.
3. Sampah dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

   Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah Organik, misalnya : kayu, bambu, triplek. Sampah Anorganik, misalnya : semen, pasir, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.
4. Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

   Sampah yang berasal dari perdagangan seperti : toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun
5. Sampah dari Industri

   Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang (Gilbert dkk, 1996).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas bahwa membedakan sumber sampah yang dihasilkan dari setiap tempat. Pengklasifikasian sumber sampah sangat memudahkan sampah yang nantinya dihasilkan sehingga secara sadar pemerintah dan masyarakat mampu menyadari pengelolaan sampah yang dihasilkan berdasarkan sumbernya.

2.1.4.2.Komposisi Sampah Padat

Komposisi sampah padat sangat bervariasi tergantung dari sumbernya, bisa berbentuk sangat padat seperti besi hingga berbentuk busa. Selain itu volume sampah juga bervariasi bisa seperti bangkai kendaraan hingga berbentuk debu. Dikutip dari Sumantri dalam bukunya "Kesehatan Lingkungan, Edisi Ketiga" mengatakan bahwa para ahli mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menentukan komposisi sampah suatu daerah. Salah satunya ialah menghitung jumlah bahan/materi sampah dalam gram/% dari sampah yang terdiri dari bahan-bahan berikut:

(a) Logam: kaleng-kaleng, besi, paku, alumunium, tembaga dan sejenisnya.
(b) Benda terbuat dari bahan kertas: koran, majalah, karton, buku dan sejenisnya.
(c) Benda terbuat dari bahan plastik: plastik pembungkus, bekas alat-alat rumah tangga dan sejenisnya.
(d) Benda terbuat dari bahan karet: ban, sandal, sepatu dan lain-lain
(e) Benda terbuat dari bahan kain: sobekan-sobekan kain, gorden, pakaian, dan lain-lain.
(f) Benda terbuat dari kaca/beling: pecahan gelas, lampu, piring, botol dan lain-lain.
(g) Benda terbuat dari kayu: kayu, ranting, kursi, meja dan lain-lain.
(h) *Garbage*: sisa-sia makanan, sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
(i) Bahan-bahan dari batu, tanah, abu dan lain-lain.

(Sumantri, 2017).

Berdasarkan yang dikemukakan diatas bahwa komposisi dari bahan-bahan tersebut penting untuk diketahui dalam perencanaan pengelolaan sampah selanjutnya, mulai dari cara pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sebelum di angkut dan dimusnahkan. Dengan mengetahui komposisi sampah padat dapat memudahkan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

2.1.4.3.Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan, pengurangan timbulan sampah, pemilahan sampah, pengangkutan ke pembuangan akhir dan penghancuran sampah. Sebagaimana dikemukakan Cunningham dalam Azrul tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari *3R* sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan (Azrul, Azwar.1990). Adapun pengertian *3R* sebagi berikut: (a) *reduce* (mengurangi) prinsip ini sebisa mungkin meminimalis penggunaan barang yang digunakan sehingga sampah yang dihasilkan sedikit, (b) *reuse* (menggunakan kembali) prinsip ini menghindari pemakaian barang sekali pakai, seperti sendok,garpu,tempat makan dan sebagainya yang hanya bisa sekali pakai, (c) *recycle* (mendaur ulang) prinsip *recycle* ini sebisa mungkin mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai untuk dijadikan barang lain yang memiliki nilai dan bisa digunakan. Tidak semua barang bisa di daur ulang namun saat ini banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan barang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, penanganan sampah *3R* sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka pengelolaan sampah padat yang efektif dan efisien, sehingga timbulan sampah yang dihasilkan sedikit dan mengurangi biaya pengelolaan sampah.

Menurut Kuncoro Sejati, pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampah dengan pembuangan akhir. secara umum dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan tansport, pengolahan dan pembuangan akhir yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penimbulan Sampah
   pada dasarnya sampah tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan. oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatan.
2. Penanganan Di Tempat
   penanganan sampah di tempat adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi tempat pembuangan. Suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah di tempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selajutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya, antara lain meliputi pemilahan (sorting), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama penanganan di tempat adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).
3. Pengumpulan (*collecting*)
   Pengumpulan merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick-up khusus sampah
4. Pengangkutan (*transfer/transport*)
   Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) menuju tempat pembungan akhir (TPA) dengan menggunakan truk sampah
5. Pengolahan (*treatment*)
   Sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Berbagai alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah adalah:
   a) Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.

b) Pembakaran (*incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meskipun pembakaran merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan, hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Namun demikian teknik pembakaran dapat berfungsi dengan baik jika kualitas sampah yang diolah memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak mengandung sampah basah dan mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi.

c) Pembuatan kompos *(composting),* yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. *Output* dari proses ini adalah kompos dan gas bio.

d) *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara maju.

6. Pembuangan akhir

   Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah open dumping, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja sehingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik open dumping berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah sanitary landfill, yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah (Sejati,Kuncoro. 2009).

Berdasarkan penjelasan diatas mengatakan bahwa secara umum dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan tansport, pengolahan dan pembuangan akhir. Pengendalian timbulan , pada dasarnya sampah tidak di produksi melainkan ditimbulkan, dalam menentukan metode yang tepat maka perlu diperhatikan besarnya timbulan sampah dari jumlah pelaku dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Penanganan di tempat, perlakuakan sampah yang di timbulkan sebelum sampah di buang. seringkali sampah yang dibuang begitu saja masih memiliki nilai ekonomis. penanganan sampah di tempat dapat memebrikan pengaruh yang signifikan

terhadap penanganan sampah selanjutnya. penanganan sampah ditempat dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pemanfaatan dan daur ulang.

Pengumpulan merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sampah sementara. pengangkutan sampah merupakan usaha pemindahan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan jenis sampah yang di produksi, ada empat cara dalam pengolahan sampah yakni transformasi fisik, pembakaran, pengomposan, *energy recovery*.

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. teknik yang saat ini dilakukan merupakan open dummping yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja sehingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Namun teknik tersebut dapat berpotensi menimbulkan masalah terhadap lingkungan. adapun teknik yang direkomendasikan yaitu sanitary landfill, yaitu pada lokasi TPA dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbulan sampah agar tidak menumpuk begitu saja.

Menurut Ni Komang Ayu Artiningsih, tindakan dalam penangan sampat di tempat yang dapat dilakukan pada setiap sumber sampah adalah sebagai berikut:

a) Reduce (Mengurangi), melalui tindakan:
   i. Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
   ii. Menggunakan produk yang bisa diisi ulang, misalnya penggunaan cairan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.
   iii. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tissu dapat dikurangi, dan menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.
b) Reuse (menggunakan kembali), melalui tindakan:
   i. Menggunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan kaleng bekas dan botol bekas.

ii. Menggunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam kurun waktu lebih lama.

c) Recycle (daur ulang), melalui tindakan:

i. Memilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai.

ii. Menggunakan sampah organik untuk dijadikan kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreaktivitas masing-masing.

iii. Menggunakan sampah anorganik untuk dijadikan kembali menjadi barang yang bermanfaat (Artiningsih, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas, mengemukakan bahwa tindakan penanganan sampah di tempat dapat dilakukan dengan 3R dimana sampah yang ditimbulkan oleh pelaku dapat di olah sendiri dengan berbagai cara berdasarkan jenis sampah yang ditimbulkan sehingga timbulan sampah yang dihasilkan sedikit.

Dalam Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008, menjelaskan sembilan pokok materi pengelolaan sampah yaitu:

a) Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah domain pelayanan publik : pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.
b) Pelaksanaan prinsip 3R dan EPR (*extended producers responsibility*) : pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Tempat pembuangan akhir (TPA) bukan lagi tempat pembuangan tetapi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
c) Pembagian kewenangan: Pemerintah, Provinsi dan Pemkab/kota, termasuk kerjasama antar daerah (regional).
d) Partisipasi masyarakat: melaksanakan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada tingkat rumah tangga, serta membiasakan diri melakukan gaya hidup bersih dan sehat.
e) Partisipasi dunia usaha: mendorong pelaksanaan EPR (*extended producers responsibility*), yaitu peran dunia usaha untuk ramah lingkungan dan mendukung penghijauan.
f) Pembiayaan: melalui APBN, APBD
g) Insentif-Disinsentif: rangsangan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi secara optimal.

h) Larangan: memasukkan sampah ke NKRI, mencampur sampah-sampah rumah tangga dengan sampah spesifik (UU RI No.18 Tahun 2008).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, terdapat sembilan pokok materi dalam pengelolaan sampah yaitu penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik, pelaksanaan prinsip 3R dan extended producers responsibility (EPR) pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, kota/kab termasuk kerjasama antar daerah. partispasi masyarakat, partisipasi dunia usaha, pembiayaan, insetif-disintensif dan larangan mencampur sampah-sampah rumah tangga dengan sampah spesifik.

2.1.4.4. *Zero waste*

Zero waste merupakan suatu konsep perancangan dan pengelolaan produk dan sistem secara sistematik. Konsep *zero waste* dilakukan untuk menghindari dan mengurangi jumlah sampah dan SDA yang digunakan, serta untuk mengkonservasi dan memulihkan kembali SDA yang sudah terkena dampak oleh limbah (Zaman dan Lehmann, 2011). Di beberapa kota-kota seperti Pune, San Fransisco, Buenos Aires, Mumbai dan La Pintana telah menunjukkan kemajuan yang nyata dalam usaha pencapaian tujuan dari *zero waste*. Bahkan beberapa kota di dunia memiliki tujuan untuk menjadi suatu kota berkonsep *zero waste* (Allen dkk,2012). Di Indonesia sendiri beberapa lembaga dan yayasan non pemerintah dan non profit sudah melakukan pengenalan serta pelatihan mengenai *zero waste*. Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPPB) yang berlokasi di Kota Bandung

telah melaksanakan kegiatan kampanye hidup bebas sampah. dimana kampanye tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat khusunya bu rumah tangga agar mau melakukan upaya pengurangan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga dan penekanan timbulan sampah.

Konsep *zero waste* merupakan suatu konsep berkelanjutan nyata yang dapat diterapkan di masyarakat khusunya di rumah tangga. konsep *zero waste* memberi pengetahuan untuk peduli terhdap lingkungan akibat dari timbulan sampah yang tidak di kelola dengan baik sehingga dapat merusah ekosistem dan menyebabkan maslaha kesehatan bagi lingkungan sekitar. Membantu dalam menekan timbulan sampah yang dihasilkan karena sampah yang dihasilkan dari rumah tangga di olah terlebih dahulu berdasarkan jenis dan dibedakan organik dan anorganik sehingga sampah dimanfaatkan terlebih dahulu dan bernilai kembali. Kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan organisasi peduli lingkungan untuk melaksanakan penerapan konsep *zero waste* pada kehidupan sehari-hari. Konsep *zero waste* ini dapat berjalan dengan baik apabila semua bekerja sama dengan baik, seperti masyarakat melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, pemerintah memberikan kebijakan, edukasi dan memiliki tempat pengelolaan sampah seperti bank sampah. Para pelaku usaha menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan organisasi peduli lingkungan memberikan sosialisasi dampak, manfaat, cara mengelola dari sampah, memberikan edukasi dengan menyelenggarakan kegiatan yang menarik dan bermanfaat untuk semuanya. Permasalahan timbulan sampah pada sampah rumah tangga dapat di selesaikan

dengan menerapkan konsep *zero waste*, sehingga sampah yang dihasilkan sedikit hingga tidak ada.

Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah sampah adalah dengan penerapan *zero waste* berbasis *Sustanable Development Goals*. Penerapan *zero waste* ini merupakan cara hidup tanpa atau meminimalkan penggunaan sampah plastik. Pemerintah daerah harus memiliki program yang berbasis *zero waste* hal itu perlu dibuat rencana program yang matang dan di jalankan disetiap bidang yang menerapkan prinsip *zero waste*. Hal ini disebabkan karena keberhasilan program yang baik dalam pengelolaan sampah memerlukan tiga hal pokok, yaitu pemahaman yang sama dari seluruh komponen masyarakat, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta tanggung jawab masing-masing komponen masyarakat dengan sruktur organisasi yang jelas. Program *zero waste* di daerah dapat mendukung timbuhnya kesadaran masyarakat. Prinsip nol sampah atau *zero waste* merupakan konsep pengelolaan sampah yang didasarkan pada kegiatan daur ulang (*Recycle*). Penggunaan kembali, minimalisasi, dan daur ulang sampah adalah hal yang sangat perlu dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang membebani TPA dan lingkungan (Maharani, dkk.2007).

2.2.Kerangka Pemikiran

Program Kang Pisman di Kota bandung merupakan program pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung periode 2018-2023 dalam upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Bandung, kemudian program tersebut dilimpahkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan (DLHK) Kota Bandung berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah untuk dapat melaksanakan program tersebut sebagai salah satu program yang harus dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Berlakunya peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah memiliki konsekuensi terjadinya perpindahan kewenangan kebersihan dan pengangkutan sampah warga ke TPA dari PD Kebersihan ke DLHK Kota Bandung, sehingga anggaran terkait pengelolaan kebersihan dibebankan kepada anggran DLHK Kota Bandung. namun, permasalahan terkait anggaran pengelolaan sampah mengalami tantangan karena masa pakai TPAS Sarimukti akan habis pada tahun 2022 dan akan berpindah ke TPA Legoknangka yang menggunakan teknologi PLTSa sebagai metode pengolahannya. Hal ini berkaitan dengan tipping fee yang dibebankan per ton sampah mengalami kanikan sebasar 600% dari tipping fee TPAS Sarimukti. Konseskuensi lainnya yaitu perpindahan kewenangan kebersihan dari PD Kebersihan ke DLHK Kota Bandung berakibat meningkatnya kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang menunjang dalam persoalan sampah sehingga kebutuhan anggaran DLHK ikut meningkat.

Program Kang Pisman yang memiliki tujuan untuk dapat mengurangi hingga dapat dikatakan *zero waste* hingga menjadi budaya bagi masyarakat Kota Bandung. Program Kang Pisman yang dimulai pada tahun 2018 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada. Pelaksanaan Program Kang Pisman hanya dilakukan di dua

kelurahan sebagai role model yakni Kelurahan Sukamiskin dan Cihaurgeulis. Hal tersebut dilakukan karena DHLK menerapkan sistem terpadu dalam pengelolaan sampah dengan membentuk Kawasan Bebas sampah (KBS) maka di bentuk tim Pendampingan Kawasan Bebas Sampah (PKBS) dan Olah Sampah (OS). Tim PKBS tersebut memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkannya sendiri dan melakukan monitoring setelah pemberian edukasi untuk memantau perkembangan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemberian edukasi kepada masyarakat dilakukan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sedangkan tim OS melakukan pengolahan sampah organik dari masyrakat untuk dijadikan kompos untuk tanaman atau sayuran.

Peneliti tertarik untuk melihat dan menganalisis program Kang Pisman di Kota Bandung dengan adanya program Kang Pisman tersebut apakah mengurangi angka volume sampah hingga menjadi kebiasaan dalam pengelolaan sampah atau program Kang Pisman ini tidak memiliki dampak yang cukup baik terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dalam upaya mengurangi, memanfaatkan dan memisahkan sampah di Kota Bandung tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengkaji dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program Kang Pisman di Kota Bandung dalam upaya kurangi, pisahkan daan manfaatkan sampah yang dihasilkan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Totok Mardikanto (2019) yang didalamnya terdapat tiga pendekatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu : Kapasitas Individu, Kapasitas Kelembagaan dan Kapasitas Jejaring.

Peningkatan kapasitas individu ialah segala upaya untuk memperbaiki mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik didalam lingkungannya maupun dalam lingkup global. Pengembangan kapasitas individu meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk dapat dikembangkan dengan baik dan mampu berguna untuk kehidupannya dan lingkungan disekitar tempat tinggalnya. Peningkatan Kapasitas Individu mengembangkan kapasitas pribadi dalam program Kang Pisman yang memungkinkan program pemberdayaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Kapasitas Individu tersebut meliputi:

Mengembangkan Kapasitas Kepribadian adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung melalui program Kang Pisman dalam upaya mengembangkan kapasitas kepribadian pemberdayaan dapat dilakukan pada masyarakat agar dapat mengelola sampah secara mandiri dan mampu.

Kapasitas kelembagaan berbeda dengan kapasitas individu yang lebih menekankan pada kualitas individu untuk dirinya sendiri pengembangan kapasitas kelembagaan lebih ditekankan kepada pengembangan mutu organisasi. Dimulai dengan kejelasan visi dan misi lembaga, kejelasan struktur organisasi, strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan, perencanaan organisasi yang matang, pengembangan jumlah sumber daya dan mutu sumberdaya serta interaksi antara individu dengan organisasi. Kapasitas Kelembagaan meliputi:

a. Kejelasan visi, misi dan tujuan serta strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam program

Kang Pisman untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Manajemen organisasi adalah upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam mengelola organisasi baik dari segi kejelasan struktur, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam program Kang Pisman

Kapasitas jejaring ialah interaksi yang dilakukan dalam suatu program, tidak hanya individu dan organisasi melaikan interaksi antar organisasi dalam sistem yang sama seperti, pemerintah, lembaga bisnis, profesi, dan kemasyrakatan. Interaksi dengan organisasi di luar sistem meliputi organisasi social-politik, organisasi ekonomi, organisasi teknologi dan organisasi lingkungan. Kapasitas Jejaring meliputi : Kerjasama dengan organisasi lainnya adalah upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam menyampaikan pelaksanaan program Kang Pisman di Kota Bandung.

Berdasarkan pendekatan pemberdayaan diatas yang telah dikemukakan oleh Totok Mardikanto, diharapkan dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program Kang Pisman di Kota Bandung.. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berkut:

Bagan 2.1.
Model Bagan Kerangka Pemikiran
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kang Pisman di Kota Bandung

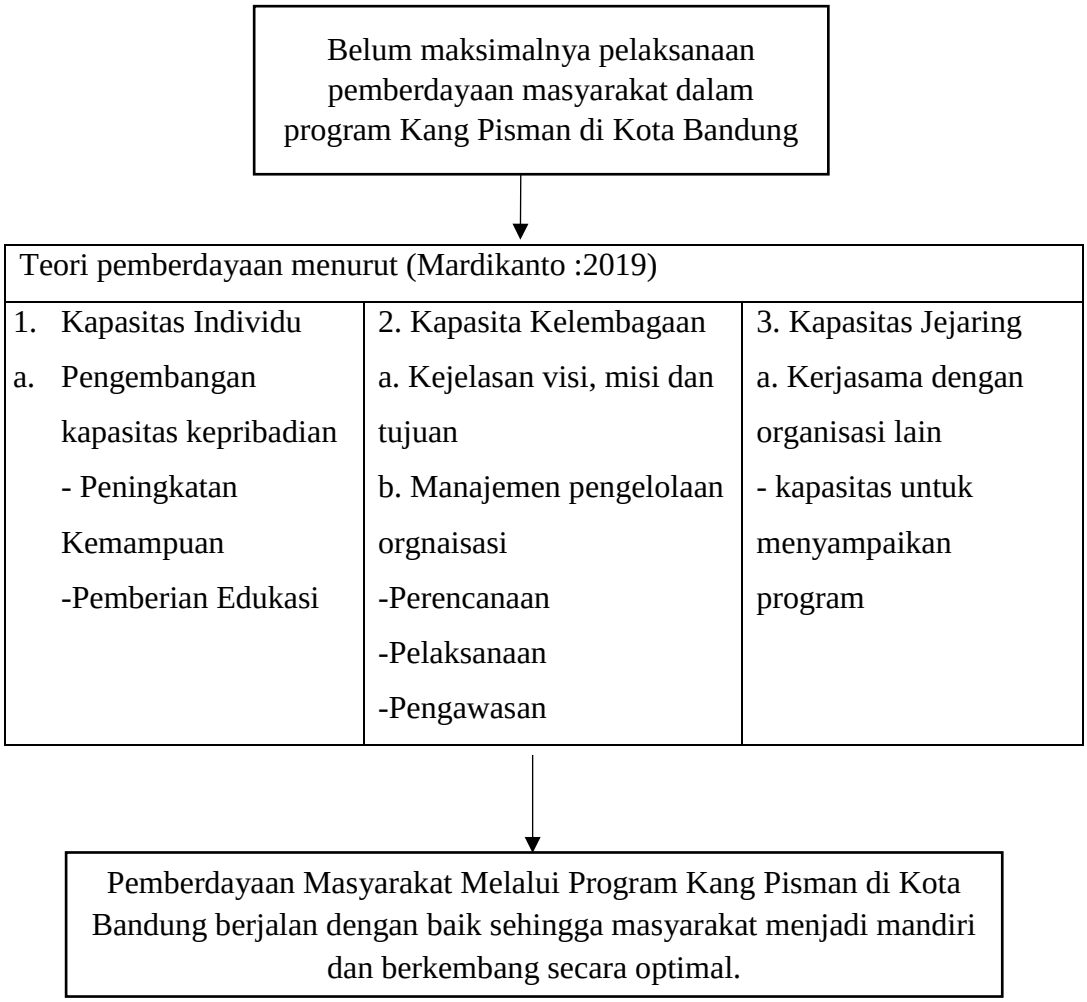

2.3.Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka proposisi penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) di Kota Bandung ditinjau dari Kapasitas Individu, Kapasitas

Kelembagaan dan Kapasitas Jejaring. Keberhasilan dari Program Pemberdayaan yakni menjadikan masyrakata yang mandiri dan dapat berkembang secara optimal